

OMBUDSMAN RI KALSEL AJAK WARGA TANAH LAUT PEDULI PELAYANAN PUBLIK

Kamis, 13 Agustus 2020 - Zayanti Mandasari

Pelatihari- Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan kembali menggelar dialog interaktif di Radio Tuntung Pandang 102,3 Mhz, yang terletak di Kompleks Perkantoran Bupati Tanah Laut (12/08). Dialog kali ini mengusung tema "Pelayanan Publik Untuk Kita Semua", dengan pembicara Kepala Keasistenan Bidang Penerimaan dan Verifikasi Laporan, M. Firhansyah dan Asisten Bidang Penerimaan dan Verifikasi Laporan, Togi L. Situmorang.

Dialog ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar berani melaporkan setiap masalah pelayanan publik khususnya di Tanah Laut. Menurut Firhansyah, "laporan di daerah Tanah Laut sendiri, yang paling tinggi adalah pengaduan tentang permasalahan pertanahan, karena memang sebagian besar masyarakat mengeluh akan proses yang terjadi ketika mereka mengurus surat pertanahan tersebut."

Lebih lanjut, Firhansyah memaparkan "di Kalsel sendiri untuk pengaduan pelayanan publik termasuk salah satu aduan tertinggi se-Indonesia, yakni sekitar 200-500 dan 2000 aduan. Peran Ombudsman dengan adanya laporan dan pengaduan tersebut, adalah mendampingi masyarakat, memproses dan menindaklanjuti hingga akhirnya memberikan saran kepada penyelenggara layanan yang diadukan masyarakat", jelasnya.

"Ombudsman memiliki aplikasi untuk mempermudah masyarakat mengecek laporannya dari pelaporan sampai ditindaklanjuti. Setiap pelaporan akan dilihat oleh Ombudsman, apakah ini dari sistem atau dari oknum. Ombudsman juga menjembatani antara rakyat dengan pemerintah", papar Togi.

Lebih lanjut Togi mengatakan, "sebenarnya ada mekanisme pengaduan internal instansi, yang bisa diakses, baik oleh masyarakat ataupun internal pegawai. Namun terkadang masyarakat/pegawai tersebut takut, karena bisa jadi dengan melaporkan dianggap melawan pimpinan jadi mereka mengadukan ke Ombudsman yang memiliki jaminan kerahasiaan Pelapor dengan catatan ada data dan bukti yang akurat."

Pada intinya, Ombudsman mengajak masyarakat Tanah Laut untuk melaporkan/mengadukan jika terjadi maladministrasi dan penyimpangan dalam pelayanan publik. Firhansyah berpesan untuk pemerintah daerah, jika ada kritikan dari masyarakat, artinya rakyat sayang pemerintah dan ingin ada perbaikan. Sehingga Ombudsman hadir untuk menjamin pelayanan pemerintah itu sampai ke masyarakat dan pengaduan ini gratis serta semua kran media kami buka agar bisa digunakan untuk melapor ke Ombudsman. Itu juga sebagian peran masyarakat untuk memperbaiki pelayanan publik.

"Negara demokrasi itu kuncinya adalah suara. Dan suara yang paling nyaring adalah suara yang memperjuangkan keadilan, salah satunya adalah suara masyarakat. Oleh karena itu, suara tersebut harus didengar untuk perbaikan pelayanan publik agar bisa baik", tutupnya.